

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PADAELO

**Supratman Tahir**

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: [supratmantahir0@email.com](mailto:supratmantahir0@email.com)

Korespondensi penulis: [supratmantahir0@email.com](mailto:supratmantahir0@email.com)

***Abstract.** The purpose of this study was to determine the ability to describe village government policies in empowering fishing communities in Padaelo Village. This study uses qualitative descriptions which are intended to provide a clear description and overall description of the existing problems regarding Village Government Policies in Empowering Fishermen Communities in Padaelo Village. Data was collected through interviews and documentation methods. The data obtained were analyzed based on the indicators found by looking at the results of interviews and documentation from research informants. The informants used were the Padaelo Village Head, Padaelo Village Secretary, Fishermen's Groups, and Fishermen's Communities. Government policy in empowering fishing communities in Padaelo village, That the village government policy in community empowerment there are several policies carried out, such as building boat moorings, then building drying floors, seaweed cultivation assistance, and business capital assistance, but behind several government policies, of course, there are obstacles faced by the village government, such as not stagnating the price of grass then the budget obtained by the village government is not able to balance the policies planned by the village government so that only a few policies are carried out to empower fishing communities.*

**Keywords:** Government Policy, Community Empowerment.

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mampu mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Padaelo. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan uraian yang jelas secara keseluruhan dari permasalahan yang ada mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Padaelo. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan indikator – indicator yang ditemukan dengan melihat hasil wawancara dan dokumentasi dari informan peneliti. Informan yang digunakan yakni Kepala Desa Padaelo, Sekretaris Desa Padaelo, Kelompok Nelayan, Masyarakat Nelayan. Kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Padaelo, bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa kebijakan yang di lakukan, seperti membangun tambatan perahu, kemudian membangun lantai jemur, bantuan budidaya rumput laut, dan bantuan modal usaha, akan tetapi di balik dari beberapa kebijakan pemerintah tentunya ada kendala yang di hadapi oleh pemerintah Desa seperti, tidak stagnannya harga rumput kemudian anggaran yang di dapat oleh pemerintah desa tidak mampu mengimbangi kebijakan yang di rencanakan oleh pemerintah desa sehingga hanya beberapa kebijakan saja yang di lakukan untuk memberdayakan masyarakat nelayan.

**Kata kunci:** Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat.

## **LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil diharapkan dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan harapan bahwa keragaman sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting yang terkandung di dalamnya dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan penyangga kedaulatan negara agar dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Dalam rangka menberdayakan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam laut dan pesisir harus dikelola dengan sistem berwawasan lingkungan berdasarkan norma hukum dengan memerhatikan tingkat kesadaran dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan (Konsideran) menimbang Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling memengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, dengan langkah-langkah konservasi.

Ketidakberdayaan masyarakat nelayan terutama dalam peningkatan taraf hidup mereka khususnya di Desa Padaelo kecamatan pulau sembilan memerlukan suatu perhatian khusus dari pemerintah desa. Hal ini penting karna selama ini kita mengetahui bahwa penghasil protein hewani terbesar adalah masyarakat nelayan yang hidup dan bermukim di pesisir dengan tetap memegang pola kehidupan tradisional dan berpedoman pada budaya leluhur yang mereka miliki dan lestarikan khususnya dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pola kehidupan masyarakat nelayan sebagaimana uraian di atas merupakan suatu yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat termasuk yang bermukim di Desa Padaelo yang juga telah memberikan andil yang sangat besar dalam upaya pembangunan daerah. Menyadari besarnya peranan nelayan dalam pembangunan daerah terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari

kekayaan laut sehingga mendorong pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan dan perhatian pada kehidupan masyarakat nelayan terutama yang bermukim di desa padaelo unsur pendukung dalam pembangunan daerah.

Salah satu daerah di kabupaten sinjai yang mempunyai potensi sumber daya perikanan dan kelautan yaitu kecamatan pulau sembilan. Dengan potensi tersebut ternyata masih banyak masyarakat nelayan yang masih mengalami kemiskinan. Menurut (Tain, 2002) salah satu indikator dari kemiskinan masyarakat nelayan antara lain yaitu pekerjaan yang tidak tetap karena sangat bergantung pada musim. Selain itu, kemiskinan nelayan juga diakibatkan oleh pendidikan yang rendah, serta teknologi yang digunakan karena sebagian besar nelayan yang ada di Indonesia masih nelayan tradisional. Maka dari itu, perlunya pemberdayaan untuk nelayan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

Pemerintah Desa telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan, tetapi masih ada nelayan yang kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya dan berada dibawah garis kemiskinan sehingga para nelayan tetap tidak berdaya. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang diberikan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan nelayan seperti kurangnya pendidikan dan pembinaan. Selain itu, pemerintah kurang memfasilitasi nelayan dalam hal memberikan akses informasi dan teknologi yang masih sulit didapatkan oleh nelayan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang "*Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Padaelo*", dengan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kebijakan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Padaelo dan apa saja hambatan kebijakan serta bagaimana upaya mengatasinya dengan fokus masalah penelitian pada bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan dan bentuk peningkatan sarana dan prasarana pembangunan fasilitas untuk masyarakat nelayan di Desa Padaelo.

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan terkait pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh (Yulianah, 2016), (Febriana Permata Ika, 2019), (Syamsuddin, 2021) memiliki tema yang sama termasuk yang di lakukan oleh Rosmiyan, 2020 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian "Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KUBE Margomulyo Kec. Air Nanningan Kab. Tanggamus). Di mana dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Hasil Penelitian Ini Adalah Efektivitas Program KUBE Di Desa Margomulyo Hanya Memenuhi 2 Ukuran Efektivitas Yaitu Ketepatan Sasaran Dan Tujuan Program. Program KUBE Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Hanya 1 Indikator Yang Belum Tercapai Yaitu Tingkat Kesadaran Dan Keinginan Untuk Berubah. Pandangan Ekonomi Islam Mengenai KUBE Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Lihat Dari Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam Hanya Memenuhi Nilai Keadilan Dan Tafakul (Jaminan Sosial).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Teori Kebijakan Pemerintah**

#### **A. Pengertian Kebijakan Pemerintah**

Menurut William Dun (1999) sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo pada blognya tentang pengertian kebijakan mengatakan bahwa: “Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif.

Sedangkan Subarsono (2005:2) menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981:1) definisi kebijakan pemerintah adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

#### **B. Kerangka kebijakan pemerintah**

Kerangka Kebijakan Publik Selanjutnya Soebarsono (2005) menuliskan bahwa kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan yang akan dicapai. Yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
2. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
5. Lingkungan sekitarnya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top-down approach atau bottom-up approach, otoritas atau demokratis .

## **2. Pemerintah Desa**

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas menurut Soetarjo dan Yuliati dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir (2007:7). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang – undang no 6 tahun 2014.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Didalam tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam undang–undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dalam prakteknya tidak sederhana seperti yang kita ucapkan berkaitan dengan aspek kemampuan rakyat, kesejahteraan, kultur, struktur mau pun” political will” penguasa.

Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepaspisahkan dengan konsep sentral, yaitu konsep Power (daya). Menurut Suriadi (2005: 54-55) Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan poststrukturalis. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya.

#### **4. Masyarakat Nelayan**

Menurut Undang – undang No 7 Tahun 2016, Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a) Nelayan Kecil
- b) Nelayan Tradisional
- c) Nelayan Buruh
- d) Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

Masyarakat nelayan adalah sebuah organisasi masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Dengan adanya masyarakat nelayan masyarakat merasa terbantu karena mereka bisa melaksanakan kegiatan penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan secara bersama-sama dan juga sangat membantu menaikkan taraf hidup masyarakat pesisir di bidang kesejahteraan ekonomi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (qualitative-descriptive). Creswell (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Sugiyono, 2013). Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait diantaranya pemerintah desa padaelo, kelompok nelayan dan masyarakat nelayan selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan Teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)**

##### **1. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Padaelo**

###### **A. Membangun rantai jemur hasil laut**

Merupakan salah satu upaya pemerintah bagaimana membantu masyarakat nelayan dalam membangun rantai jemur hasil laut, di mana rantai jemur laut

merupakan kegiatan pasca panen yang penting. Keterbatasan lokasi penjemuran, tenaga kerja dan saat musim hujan mengakibatkan penundaan penjemuran. Oleh karena itu di perlukan peran pemerintah setempat bagaimana membantu membangun lantai jemur hasil laut agar memberikan hasil maksimal bagi masyarakat nelayan.

Adapun untuk jumlah lantai jemur hasil laut, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Lantai Jemur Hasil Laut

No	Jenis Bantuan	Dusun	Unit
1	Lantai Jemur Hasil Laut	Batanglampe 1	12
2		Batanglampe 2	10
3		Kodingare	10

Sumber: Desa padaelo

Berdasarkan Data jumlah Lantai Jemur Hasil Laut, dapat di ketahui bahwa ada 3 Dusun Desa Padaelo yang mendapatkan bantuan jenis Lantai Jemur Hasil Laut dengan jumlah unit yang berjumlah 32 unit.

Dengan demikian dari hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah membangun lantai jemur hasil laut, sangat efektif bagi kelompok maupun masyarakat nelayan, di mana kebijakan ini sangat membantu masyarakat nelayan dan tentunya ini salah satu kebijakan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan.

## **B. Membangun tambatan perahu**

Merupakan Salah satu upaya pemerintah bagaimana membangun sarana seperti tempat untuk mengikat/menambat perahu-perahu saat berlabuh/parkir sebelum dan setelah bongkar muat muatan (barang dan orang, dll) Tambatan perahu merupakan bagian dari yang melengkapi bangunan lain seperti tempat pelelangan ikan, lingkungan kampung nelayan.

Dengan pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah membangun tambatan perahu, mampu memudahkan masyarakat yang memiliki kapal, sehingga masyarakat dapat terbantu dan semua kegiatan yang di lakukan melalui kapal dapat berjalan lancar.



Tabel 2. Data Jumlah Tambatan Perahu

No	Jenis Bantuan	Dusun	Unit
1		Batanglampe 1	3
2	Tambatan Perahu	Batanglampe 2	2
3		Kodingare	2

Berdasarkan Data jumlah Tambatan Perahu, dapat di ketahui bahwa ada 3 Dusun Desa Padaelo yang mendapatkan bantuan jenis tambatan perahu dengan jumlah unit yang berjumlah 7 unit.

Dengan demikian dari di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah membangun tambatan perahu, tentunya sangat membantu masyarakat nelayan yang memiliki kapal, di mana banyaknya kapal yang sering melakukan pembongkaran barang tentunya dengan kebijakan seperti ini sangat efektif yang di lakukan oleh pemerintah desa.

### C. Bantuan budidaya rumput laut

Budidaya rumput laut adalah praktik menanam dan memanen rumput laut. Spesies pangan utama yang dikembangkan pada budi daya perairan di Jepang, China dan Korea meliputi Gelidium, Pterocladia, Porphyra, dan Laminaria. Sehingga dengan demikian sangat di perlukan perhatian khusus dari pemerintah bagaimana membantu para masyarakat nelayan sebagai pembudidaya rumput laut dalam meningkatkan perekonomiannya. Seperti pemebrian bibit rumput atau prasarana lainnya.

Tabel 3. Data Jumlah Penerima Bantuan Budidaya Rumput Laut

No	Jenis Bantuan	Dusun	Kelompok
1		Batanglampe 1	8
2	Budidaya Rumput Laut	Batanglampe 2	4
3		Kodingare	7

Berdasarkan Data Jumlah penerima Bantuan Rumput Laut, dapat di ketahui bahwa ada 3 Dusun Desa Padaelo yang di mana setiap dusun ada beberapa kelompok yang menerima bantuan Budidaya Rumput Laut, dengan jumlah kelompok yang berjumlah 19 Kelompok.

Dengan demikian dari beberapa hasil pernyataan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam bantuan budidaya rumput

laut, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan dari kementerian kelautan dan perikanan, di mana pemerintah desa hanya bagaimana berusaha membantu masyarakat nya agar masyarakat atau kelompok nelayan yang berada di desa padaelo dapat menerima bantuan baik berupa bibit maupun sarana pendukung lainnya, dan harapan masyarakat nelayan adalah bagaimana pemerintah desa sering mengadakan sosialisasi terkait bantuan budidaya rumput laut tersebut, sehingga masyarakat juga tahu bahwa adanya bantuan budidaya rumput laut dari kementerian.

#### **D. Bantuan modal usaha**

Dalam mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera termasuk pula diantaranya yaitu para nelayan. Untuk itu, pemerintah harus terus mendorong para nelayan untuk meningkatkan usaha perikanan dengan memberikan bantuan berupa modal usaha bagi para nelayan.

Tabel 4. Data Jenis/Bantuan dan Jumlah Penerima

<b>No</b>	<b>Jenis / bentuk bantuan</b>	<b>Jumlah penerima</b>
1.	Gapoktan	1 kelompok
2.	Kel. Simpan pinjam perempuan	6 kelompok
3.	Kel. Budiaya rumput laut	19 kelompok
4.	Kel. Nelayan tangkap	5 kelompok

Berdasarkan Data Jenis/Bantuan dan jumlah penerima, dapat di ketahui bahwa ada 31 kelompok yang menerima bantuan dari Pemerintah Desa Paadelo.

Dengan demikian dari beberapa hasil pernyataan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam bantuan modal usaha, di mana untuk bantuan ini ada beberapa jenis bantuan di antaranya Gapoktan, Kelompok simpan pinjam perempuan, Kelompok budidaya Rumput laut, Kelompok nelayan tangkap. Sehingga untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha tersebut mesti memenuhi persyaratan yang telah di sampaikan oleh pemerintah desa.

#### **E. Bantuan Padat Karya Tunai**

Padat karya tunai (Cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi

lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting

Adapun jenis bantuan lainnya dari pusat maupun pemda dan jumlah penerima dapat di lihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Jenis Bantuan lainnya dan Jumlah Penerima

No	Jenis bantuan	Jumlah
1	BLT	107 Kpm
2	PKH	72 keluarga
3	BNPT	45 keluarga
4	BST	9 keluarga
5	BPUM	250 Orang

Berdasarkan Data jenis bantuan lain yang di dapatkan dan jumlah penerima, dapat di ketahui bahwa ada 5 Jenis bantuan seperti BLT, PKH, BNPT, BST, Dan BPUM yang di dapatkan oleh masyarakat Desa Padaelo.

Dengan demikian dari beberapa hasil pernyataan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam bantuan padat karya tunai ini sangat membantu dalam memberdayakan masyarakat nelayan yang sedang bekerja sebagai tenaga kerja bangunan lantai jemur hasil laut dan bangunan tambatan perahu atau proyek lainnya dari Desa Padaelo.

## **2. Hambatan internal dan eksternal**

Di mana hambatan yang di maksud adalah hambatan internal dan eksternal yang di hadapi oleh pemberi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemerintah Desa Padaelo. Seperti apa hambatan yang di hadapi akan di sampaikan oleh pemerintah desa di saat melakukan wawancara.

Dengan demikian berdasarkan pernyataan kepala desa padaelo terakit dengan hambatan yang di hadapi dapat disimpulkan bahwa kalau kendala yang di hadapi pasti ada, di mana yang pertama harga rumput laut yang masih stagnan dan tidak menetap harganya, kemudian yang kedua adalah anggaran yang di dapat oleh pemerintah desa.

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Aprillia Theresia, - Dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta
- Abd. Rahim, Sri Kartika Syam, 2016, *Dalam Penelitian Tentang Estimasi Pendapatan Nelayan Tangkap Perahu Motor Tempel Di Provinsi Sulawesi*
- Agyl Satya Ajie (2013), *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Daerah Pesisir Di Desa Gejungan Kecamatan Probolinggo*,
- Badrul Jamal (2014), *Dalam Penelitan Tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Desa Klampis Kabupaten Bangkalan*,
- Elvira Ramdayanti , 2 Gilli Argenti, 3 Prilla Marsingga, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk) Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 5 Issn 25280-1852, E-Issn: 2721-0537 Vol Vi, No.02, Desember 2021
- Febriana Permata Ika, 2019, *Universitas Negeri Yogyakarta, Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi Di Dusun Gamol, Desa Balecatur, Gamping, Sleman Yogyakarta..*
- Hasan. M, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Daerah Pesisir Kecamatan Blang Mangat, Skripsi. FISIP Unimal.*
- Hikmat A, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. 240 hlm.*
- Kusnadi, Sumarjono, Sulistiowati, Yunita, Subchan, Puji. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.*
- Muhammad Arlim (2013), *Pengaruh Modal, Jam Kerja, Pengalaman Kerja Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*

Mursidah. (2016) *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Gampong Pusong Kecamatan Banda Sakti*, Skripsi. FISIP Unimal.

Neli Ardianti, 2019, *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberian Kapal Dan Alat Tangkap Di Desa Kuala Simbur*

Nusaiba Zahratul Firdaus, 2020, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Gulamah*

Puspita Fitriansyah<sup>1\*</sup>, Darwis<sup>2</sup>, Viktor Amrifo<sup>3</sup>, *Studi Mitigasi Covid-19 Bagi Masyarakat Nelayan Desa Sungai Kayu Ara Kabupaten Siak Provinsi Riau*, 31 Januari 2022

Rosmiyan, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *“Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KUBE Margomulyo Kec. Air Nanningan Kab. Tanggamus*

Ria Rizky Wardianti, UIN Raden Intan Lampung, *Eran Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)*

Siswanto B. 2008. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum nelayan*. Malang: Laksbang Mediatama. Hlm 193-216.

Suddin, S., & Tahir, S. (2021). PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BIRORO KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI. *DEMOKRASI*, 1(2).

Suharto E, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suhendra. 2006. *Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Totok Mardikato, 2010, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. *Sebelas Maret University Pers*

Wiwik (2010), *Dalam Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai Di Kabupaten Tuban Studi Kasus Di Desa Gadon, Kecamatan Tambaboyo, Kabupaten Tubun*

Widodo J dan Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 252 hlm.

Yuswandi Yusuf, *Strategi Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Krisis Dimasa Pandemi Covid-19*, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar 2021

**JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara**

**Vol.18, No.2 Desember 2021**

e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN: 2085-1804, Hal 134-147

Yulianah, Y. (2016). *Pemberdayaan Keluarga Nelayan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kampung Maccini Baji Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).